

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemunculan kelompok Boko Haram di Nigeria, jika merujuk pada keterangan dari Kementerian Informasi dan Pertahanan Nigeria menyebutkan bahwa Boko Haram muncul sejak tahun 1995, dipimpin Abubakah Lawan. Kemunculan ini diawali dari pembentukan sekte yang bernama *Ahlulsunnawal Jama'ah* di Universitas Maiduguri, Borno, Nigeria Utara dan berkembang menjadi gerakan teroris terhadap pemerintah Nigeria. Kelompok ini menanamkan ideologi Islam radikal¹ dan pemahaman yang memosisikan pemerintah Nigeria sebagai pihak yang salah, salah satunya adalah upaya Boko Haram untuk menerapkan hukum hukum Islam dalam peraturan negara (Tonwe & Eke, 2013: 234). Penanaman ideologi ini semakin diperkuat ketika Boko Haram mengalami pergantian kepemimpinan sekte dengan munculnya Mohammed Yusuf sebagai pemimpin pada tahun 2002. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Mohammed Yusuf yang menyebutkan bahwa segala bentuk demokrasi dan pendidikan dari Barat merupakan sesuatu yang haram dan harus ditolak, serta pernyataan bahwa pemerintah Nigeria harus digantikan karena tidak sesuai dengan nilai nilai pemerintahan *ala* Islam (Onuoha, 2010: 55).

Merujuk pada pernyataan dari Mohammed Yusuf (dalam Agbiboa, 2013: 4), Yusuf menyatakan “Boko Haram adalah pejuang Islam yang sedang melakukan jihad dan apa yang kami lakukan merupakan tradisi dari ajaran Islam.” Di salah satu baris pernyataan, Yusuf juga menyebutkan bahwa Boko Haram tidak akan menerima bentuk pemerintahan Nigeria yang sedang diterapkan saat itu dan tidak mempercayai sistem tata negara *ala* Dunia Barat yang diterapkan di Nigeria. Boko Haram dengan jelas juga menyatakan akan melakukan perlawanan bagi mereka

¹ Boko Haram berasal dari dua kata yakni “boko” yang secara harfiah berarti buku dan “haram” yang berarti “forbidden, sinful”. Jika digabungkan, maka dua kata ini dapat diartikan sebagai “Western education is sinful or sacrilegious”. Abimbola Adesoji. 2010. The Boko Haram Uprising and Islamic Revivalism in Nigeria, *Africa Spectrum* 45(2), pp. 98.

yang mendukung pemerintah Nigeria. Lebih jelasnya lagi, dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh juru bicara Boko Haram, Abubakah Shekau (dalam Agbiboa, 2013: 5) pada tahun 2012

“We will not allow the Nigerian Constitution to replace the laws that have been enshrined in the Holy Qur’an, we will not allow adulterated conventional education (Boko) to replace Islamic teachings. We will not respect the Nigerian government because it is illegal. We will continue to fight its police and military because they’re not protecting Islam ...”

Keberadaan Boko Haram yang terbentuk di wilayah bagian utara Nigeria dan memiliki basis besar di daerah utara seperti negara bagian Kano hingga daerah barat daya seperti Maiduguri dapat dimaklumi mengingat bahwa wilayah tersebut memiliki permasalahan ketimpangan sosial ekonomi yang cukup tinggi. kelompok seperti Boko Haram mampu menarik massa yang cukup besar dari wilayah ini karena kondisi warga benar benar dimanfaatkan sebagai alat dukungan. wilayah Nigeria bagian utara dikenal memiliki masalah dengan pemerataan hasil ekonomi, tingkat pendidikan rendah, kemiskinan yang tinggi, korupsi oleh elit pemerintah yang berujung pada ketidakpercayaan akan kemampuan dan dendam terhadap pemerintah pusat di wilayah negara bagian selatan. Penyebutan istilah Boko Haram ini sendiri juga berasal dari warga lokal dan media setempat. istilah ini muncul karena ajaran utama dari kelompok teroris ini adalah “segala hal yang berasal dari dunia Barat dilarang untuk diterapkan”. Merujuk pada hasil wawancara dengan Mohammed Yusuf pada tahun 2009 ketika diinterogasi dalam tahanan, Yusuf sendiri enggan untuk mengakui bahwa nama Boko Haram tepat. Mohammed Yusuf lebih memilih agar kelompoknya dikenal dengan nama *Ahlussunah Waljamaah*.

Perlawanan pertama Boko Haram terhadap pemerintah Nigeria terjadi pada Desember 2003 dengan melakukan serangan terhadap kantor polisi di Geiam dan Kanamma, negara bagian Yobe, Nigeria. Anggota Boko Haram kemudian menduduki kantor polisi dan beberapa fasilitas umum selama beberapa hari

sekaligus mengibarkan bendera Taliban di gedung gedung yang telah mereka kuasai. Sebagai langkah perlawanan, pemerintah Nigeria melakukan operasi gabungan antara militer dan kepolisian untuk mengambil kembali fasilitas umum yang dikuasai. Operasi gabungan ini menimbulkan korban sebanyak 18 orang di pihak Boko Haram dan menahan sebagian besar sisa anggota Boko Haram yang tidak mampu melarikan diri. Kemudian pada tahun 2004, kegiatan yang dilakukan sekte dinilai semakin mengancam ketika mahasiswa dan sebagian besar pemuda di negara bagian Borno dan Yobe menyatakan diri sebagai anggota sekte Boko Haram dan menarik diri dari sekolah atau kampus, meninggalkan identitas almamater dan bergabung dalam pengajaran atau dakwah nilai nilai Islam *ala* Boko Haram (Mohammed, t.t., dalam Montclos, 2014:20).

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Boko Haram, menjadi perhatian domestik, regional, dan internasional. Dinilai dari dampak pasca serangan yang dilakukan bulan Juli 2009 ketika muncul gerakan anti pemerintahan berdaulat Nigeria yang mengakibatkan delapan ratus orang terbunuh. termasuk diantara korban tersebut adalah masyarakat sipil, anggota Boko Haram sendiri, dan aparat keamanan. Serangan yang berlangsung selama lima hari tersebut berakhir dengan penangkapan pemimpin Boko Haram, Mohammed Yusuf (Onuoha, 2014a: 2). Pada tahun tersebut, serangan kelompok Boko Haram diidentikkan dengan tindakan yang didorong oleh keinginan untuk balas dendam terhadap politisi, polisi, dan otoritas Islam yang menindas kelompok Boko Haram secara brutal. Namun, kelompok Boko Haram terus beradaptasi dan mengubah taktiknya secara berkala serta mengubah target teror mereka selama serangan (Walker, 2012: 2).

Sejak serangan pertama terhadap pemerintah di tahun 2003, modus operandi Boko Haram sebagian besar menggunakan cara konfrontasi terbuka terhadap pemerintah. Hingga pasca 2009, ketika pimpinan sekte, Mohammed Yusuf ditangkap dan diberikan hukuman mati oleh pemerintah Nigeria, sekte ini kemudian memilih untuk melakukan kegiatan secara diam diam atau gerakan bawah tanah dan mengembangkan metode teror yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Jika sebelumnya lebih cenderung untuk melakukan konfrontasi

langsung terhadap pemerintah, maka pasca 2009 kelompok Boko Haram memilih untuk melakukan pembunuhan terencana yang ditargetkan ke para polisi, politisi atau elit publik, dan masyarakat umum melalui serangan bersenjata melalui penembakan dari atas kendaraan, penggunaan anak-anak dan pemuda untuk bom bunuh diri yang dikirimkan ke tempat-tempat dimana budaya Barat disajikan terbuka (Human Rights Watch, 2012). Hal ini dibuktikan dengan metode serangan Boko Haram yang pada awal kemunculannya, setiap serangan direncanakan dengan buruk melalui serangan langsung terhadap aparat keamanan Nigeria. Hingga terjadi peningkatan persenjataan termasuk dalam menggunakan peledak, taktik pembunuhan terencana, penyergapan, penembakan ketika berkendara, bom bunuh diri, dan penculikan (Onuoha, 2012). Jumlah korban pasti dari serangan Boko Haram tidak pernah diketahui, meskipun jika merujuk pada keterangan Presiden Jonathan, Boko Haram telah menyebabkan 12.000 orang terbunuh, 8.000 orang terluka, dan belum termasuk jumlah ribuan pengungsi atau masyarakat sipil terdampak yang kehilangan wilayahnya akibat serangan Boko Haram (Wakili & Igidi, 2014, dalam Onuoha, 2014a: 2-3).

Boko Haram dikenal memiliki basis operasi di sekitar wilayah Zinder, wilayah yang terletak di sepanjang perbatasan Niger dan memiliki beberapa titik transit yang digunakan menuju Mali dan Mauritania untuk berhubungan dengan AQIM dan kelompok ekstremis lainnya di wilayah utara Afrika. Tindakan ini dilakukan untuk kegiatan latihan gabungan antar kelompok ekstremis, arus keuangan, dan arus persenjataan ilegal. Menghadapi hal ini, pada tahun 2008 pemerintah Nigeria dan Niger memiliki rencana patroli perbatasan gabungan. Rencana kerjasama ini juga dirundingkan antara Benin dengan Nigeria, dengan daerah operasi spesifiknya terletak di perbatasan barat Nigeria. Salah satu yang diunggulkan pemerintah Nigeria adalah kemampuan pesawat tanpa awak atau *drone* yang dapat disertakan dalam operasi gabungan tersebut (Udounwa, 2013).

Awalnya, keberadaan Boko Haram di wilayah Chad hanya terbatas di sisi danau yang berbatasan dengan Nigeria. Namun, peningkatan intensitas serangan yang terjadi secara cepat di tahun 2015, membutuhkan penanganan dan intervensi dari

Chad untuk membantu negara-negara di kawasan Danau Chad. Pasca keterlibatan militer Chad di negara lain, dua serangan bom bunuh diri di ibukota Chad, N'Djamena terjadi. Dua serangan bom bunuh diri tersebut juga diikuti dengan beberapa serangan yang ditujukan ke lingkungan perkampungan dan pos-pos militer di kawasan Chad. Hingga paruh kedua tahun 2016, di mana jumlah serangan di kawasan Chad menurun, ditandai dengan penyerahan diri anggota Boko Haram. Namun, penyerahan diri ini hanya dilakukan oleh sekelompok anggota yang terhitung masih baru, sehingga masih menyisakan beberapa kelompok garis keras yang menolak untuk menyerah dan melanjutkan serangan sepanjang tahun 2016. Terhitung sejak 2015 hingga awal tahun 2017, jumlah korban akibat dari serangan Boko Haram diperkirakan lebih dari 100.000 jiwa terlantar dan tujuh ribu pengungsi di kawasan Chad (International Crisis Group, 2017: 3-4).

Isu terorisme Boko Haram yang bersifat kontinu dan selalu berubah mirip dengan situasi yang dialami oleh negara-negara di kawasan Afrika yang harus berhadapan dengan kelompok-kelompok etno-religius dan etnopolitik. Keberadaan Boko Haram menyerupai kehadiran kelompok-kelompok milisi lain di awal kemerdekaan negara-negara di Afrika seperti Movement of Emancipation of Niger Delta, Pergerakan Negara Berdaulat Biafra, dan kelompok-kelompok milisi seperti Tav, Tarok, dan Jukun di wilayah utara (Hanson, 2016: 208). Merespon pergerakan Boko Haram, respon militer yang dilakukan secara regional dibuktikan dengan pembentukan MNJTF atau Multinational Joint Task Force. MNJTF yang awalnya dibentuk pada tahun 1998 merupakan pasukan keamanan yang bertujuan untuk menghadapi tindakan pencurian lintas batas, penyelundupan dan tindakan kriminal di Nigeria, Chad, dan Niger. Namun, MNJTF mengalami pembaruan mekanisme pada tahun 2010 seiring dengan meluasnya pergerakan Boko Haram yang lintas batas. MNJTF pada tahun 2010 beranggotakan Nigeria, Chad, Niger, dan Kamerun (Alli, 2012, dalam Hanson, 2016: 210).

MNJTF menggambarkan kerjasama militer dan keamanan yang bersifat bebas namun terstruktur, artinya secara keanggotaan memiliki komposisi yang beragam

dan kegiatan yang dilakukan MNJTF memiliki dampak lintas batas. MNJTF dilegitimasi dan mendapat pengakuan internasional sebagai mekanisme kerjasama pada bulan Mei tahun 2014 di KTT Paris dengan dihadiri oleh negara negara LCBC. KTT Paris ini menghasilkan legitimasi internasional untuk memungkinkan terjadinya dukungan secara bilateral maupun multilateral dan mendorong penguatan hasil intelejen. Selain itu, MNJTF juga mampu digunakan sebagai *platform* bersama bagi negara negara LCBC untuk merumuskan dan melakukan tindakan *counter-terrorism* secara regional dan pengawasan batas negara yang lebih terkoordinasi (Hanson, 2016: 211).

Beberapa bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara negara anggota MNJTF diantaranya adalah operasi militer gabungan yang dilakukan secara berkelanjutan di kawasan kawasan perbatasan negara. Hal ini ditujukan sebagai upaya untuk mengelilingi atau mengepung Boko Haram dan memotong jalur pelarian dari tiap tiap perbatasan negara. Selain itu, MNJTF juga menerapkan operasi mata mata gabungan, menargetkan kamp operasional Boko Haram, memotong jalur suplai logistic bagi Boko Haram, dan melacak pergerakan anggota Boko Haram yang bersifat lintas batas. Selain itu, tercatat pula bahwa beberapa kali MNJTF merespon alarm bahaya dari masyarakat local dan bergabung dengan komunitas lokal untuk tindakan lanjutan (Xinhua, 2011, dalam Hanson, 2016: 211). Meskipun bersifat kerjasama multilateral, inisiatif awal dari setiap tindakan MNJTF dipimpin oleh Nigeria yang bertindak sebagai koordinator dalam operasi keamanan, pengawas dari alat alat persenjataan dan secara struktural sebagai pemimpin (Vanguard, 2015, dalam Hanson, 2016: 211).

Serangan Boko Haram menunjukkan bahwa isu terorisme ini juga menjadi isu bersama bagi negara negara yang berbatasan dengan Danau Chad dan Nigeria. Puncak kekerasan di wilayah Chad terjadi di tahun 2015 ditandai dengan serangan bom bunuh diri di ibukota Chad, Njamena, dan di wilayah Danau Chad. Pemerintah Chad melibatkan kekuatan militer untuk melawan serangan terorisme tersebut, sekaligus untuk meningkatkan nilai diplomatik dalam forum regional. Hal ini ditunjukkan dengan penunjukkan Perdana Menteri Chad, Moussa Faki,

sebagai *chairperson* dalam Uni Afrika. Pemerintah Chad memutuskan bahwa untuk menangani serangan terorisme Boko Haram, dibutuhkan kerjasama regional yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Termasuk dalam langkah perlawanan tersebut adalah pengurangan keterlibatan militer dalam menangani isu terorisme dan mengedepankan keterlibatan lingkungan masyarakat. Tidak hanya itu, pemerintah Chad juga mengusulkan untuk perencanaan pembangunan ekonomi jangka panjang sebagai langkah menangani isu-isu yang dinarasikan oleh kelompok Boko Haram dalam perekrutan anggota dan perluasan wilayah operasi (International Crisis Group, 2017: 3).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada kondisi dan aktivitas Boko Haram yang telah peneliti paparkan di latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang peneliti rumuskan adalah: mengapa Nigeria membutuhkan kerjasama dengan Chad untuk mengatasi permasalahan teroris lintas batas Boko Haram?

1.3 Tujuan Penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti berusaha mengamati dan menemukan urgensi dari tindakan kerja sama yang telah dilakukan oleh Nigeria dan Chad dalam menghadapi serangan terorisme Boko Haram.

1.4 Tinjauan Pustaka

Pada tinjauan pustaka, peneliti mengambil lima hasil studi yang membahas mengenai Al Qaeda, IRA, dan ISIS sebagai pembandingan dengan kelompok Boko Haram. Lima karya tersebut meliputi: 1) “Inside Al Qaeda”, ditulis oleh Rohan Gunaratna tahun 2002 yang membahas mengenai kondisi struktural dari Al Qaeda dan melalui hal tersebut, membantu memformulasikan kebijakan yang seharusnya diambil dunia internasional. Termasuk dalam hasil penelitiannya adalah strategi dan teknik yang digunakan oleh Al Qaeda, pemilihan target dan cara menanggulangi kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Al-Qaeda; 2) “The Syrian Jihad: Al Qaeda, Islamic State and The Evolution of an Insurgency”,

ditulis oleh Charles Lister tahun 2015 dan lebih banyak membahas mengenai awal kemunculan Islamic State dan kompetisi yang terjadi di antara kelompok teroris dan *jihadist*, hingga keputusan Islamic State untuk mendeklarasikan sistem kekhalifahan pada tahun 2014; 3) “Terrorism in Maghreb”, hasil penelitian dari Anneli Botha yang dipublikasikan tahun 2008, membahas mengenai kemunculan AQLIM atau Al-Qaeda in The Land of Islamic Maghreb pada tahun 2007. Anneli Botha secara spesifik menggambarkan kondisi di tiga negara yaitu Aljazair, Tunisia, dan Maroko. Anneli Botha juga memberikan gambaran dari tiga negara tersebut dalam menarasikan serangan teroris yang terjadi di negara masing masing dan bagaimana tiga negara tersebut dalam merespon ancaman teroris; 4) “Combating Terrorism in Northern Ireland”, hasil karya dari James Dingley tahun 2009. James Dingley pada tulisan ini menunjukkan faktor sejarah yang membentuk IRA dan keterkaitan antara IRA dengan dua kelompok agama terbesar di Irlandia Utara, yaitu Katolik dan Protestan; dan 5) “Al-Qaeda, The Islamic State, and the Global Jihadist Movement”, karya dari Daniel Byman tahun 2015. Pada tulisan ini, secara spesifik membahas mengenai kemunculan pertama Osama bin Laden pasca Invasi Soviet di Afghanistan, justifikasi Al-Qaeda dalam memosisikan Amerika Serikat sebagai target utama, Al-Qaeda sebelum dan sesudah 11 September, gagasan dasar atau ideologi yang mendasari kelompok tersebut, serta afiliasi mereka di berbagai wilayah.

Pada tinjauan pertama, “Inside Al-Qaeda” yang ditulis oleh Rohan Gunaratna, karya ini menggambarkan bahwa Al-Qaeda merupakan kelompok terorisme multinasional pertama di abad dua puluh satu dan memberikan bentuk ancaman baru terhadap dunia. Disebut demikian karena menurut Rohan Gunaratna Al – Qaeda mampu menggeser hakikat terorisme yang pada awalnya hanya terbatas pada tindakan protes dan perlawanan menjadi sebuah tindakan yang berorientasi global dengan menabrakkan nilai nilai Barat dengan nilai nilai Islam yang diyakini oleh Al-Qaeda. Sebagai sebuah instrumen global, Al-Qaeda memiliki kapabilitas untuk menggerakkan dan memunculkan konflik global dalam bentuk baru yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Hal ini memungkinkan untuk

terjadi karena apa yang dilakukan oleh Al-Qaeda berbeda dengan pemahaman umum dari tindakan terorisme sebelumnya. Al-Qaeda mengembangkan pola komunikasi dan kontak melalui kurir, mengedepankan pertemuan *one on one* dan secara bersamaan mampu memangkas kemampuan intelijen pemerintah untuk melakukan pengumpulan data terkait kelompok ini.

Tindakan 11 September, oleh Gunaratna digambarkan sebagai sebuah tindakan yang mendemonstrasikan eskalasi ancaman yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan metode penyerangan yang mengagumkan. Tindakan teror tersebut seolah menjadi *pioneer* dari beragamnya model serangan yang ditujukan kepada pihak barat dalam serangan teror jangka panjang dan mempertahankan hubungan konfliktual dengan dunia barat. Sebelum serangan tersebut, nama Al-Qaeda tidak pernah digunakan oleh Osama bin Laden sendiri. Istilah Al-Qaeda hanya sebatas istilah yang bersifat virtual, penuh kerahasiaan, dan berkali kali disangkal untuk menimbulkan kesan tidak pernah terekspos publik. Pemilihan target Al-Qaeda terhadap mayoritas dunia barat sendiri juga berdasarkan pada asumsi bahwa dunia barat merupakan wilayah paling rawan karena penerapan demokrasi liberal secara penuh yang mengedepankan toleransi dan kebebasan untuk berkumpul menjadi celah bagi para anggota Al-Qaeda untuk beroperasi.

Menurut Gunaratna, cara paling efektif bagi negara untuk merespon tindakan Al-Qaeda adalah dengan menargetkan pimpinan Al-Qaeda, meruntuhkan rantai komando dari organisasi tersebut, dan memetakan serta menghancurkan basis basis kamp pelatihan yang tersebar. Dimana untuk mewujudkan ini memerlukan kekuatan militer dan peran intelijen negara negara di dunia.

Tinjauan kedua, “The Syrian Jihad: Al Qaeda, Islamic State and The Evolution of an Insurgency”, Charles Lister menggambarkan bahwa hasil penelitiannya membahas lebih dari sekedar *jihadist* Suriah. Lister berargumen bahwa kemunculan Islamic State bukanlah hal yang mengagetkan, mengingat berbagai kelompok *jihadist* telah menetapkan Suriah sebagai basis mereka. Sebagian besar kelompok *jihadist* ini memiliki figur dan rantai komando yang diisi oleh orang

orang veteran berpengalaman yang dahulunya berada di lingkup elit Al-Qaeda. Kompetisi yang terjadi di antara kelompok ini mengerucut pada dua kelompok besar yaitu IS dan Jabhat Al-Nusra. Menerapkan *power politics* yang diusung oleh Machiavelli, Jabhat al-Nusra menjadi kelompok yang beritndak pragmatis dan menajdi penantang IS di Suriah. Namun, IS dengan kemajuan yang diperoleh pasca serangan ke Iraq dan deklarasi negara kekhalfahan menjadi satu tantangan besar bagi Jabhat al-Nusra di wilayah Suriah tersebut. Terlebih lagi masifnya pemberitaan tentang IS dan prioritas IS sebagai target berbagai serangan udara menjadi salah satu bentuk rivalitas antar dua kelompok teroris tersebut.

Pada tinjauan ketiga, hasil dari Anneli Botha yang secara spesifik membahas AQLIM, menitikberatkan pada ancaman dan makna dari perubahan nama yang dilakukan oleh GSPC atau Salafist Group for Combat and Preaching menjadi Al-Qaeda in the Land of Islamic Maghreb. Perubahan ini dipercaya bahwa ada perubahan orientasi yang menunjukkan ambisi internasional dari AQLIM. Selain itu, dalam hasil penelitian ini, Anneli Botha juga menyajikan definisi yang diberikan oeh organisasi regional di Afrika terkait terorisme dan AQLIM itu sendiri. Anneli Botha juga secara spesifik meneliti tiga negara yaitu Aljazair, Tunisia, dan Maroko dalam merespon teror dari AQLIM. Selain itu, Botha juga memberikan dasar secara dimensi politik, sosio-ekonomi, dan dimensi budaya yang dapat mempengaruhi terbentuknya kelompok kelompok fundamentalis keagamaan yang berujung pada berkembangnya kelompok ekstremis. Walaupun secara detail, Botha juga menyebutkan bahwa fokus penelitiannya terpusat ada GSPC, pengaruh Al-Qaeda terhadap kelompok GSPC, dan serangkaian tindakan teror yang dilakukan di tiga negara tersebut. Anneli Botha menawarkan tiga strategi pendekatan untuk menangani terorisme dalam bentuk AQLIM tersebut meliputi: 1) strategi politik, yang berwujud pada pemberian amnesty terhadap pelaku; 2) restrukturisasi sosi-ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan edukasi dan pengendalian kegiatan keagamaan; 3) penilaian atau antisipasi terhadap kelompok teroris transnasional dengan mengedepankan kerjasama

multilateral untuk melakukan penangkapan terhadap terduga teroris. Termasuk dalam hal ini memeriksa afiliasi dari kelompok teroris dengan aktor non negara.

Tinjauan keempat. Kemunculan IRA dilihat dari faktor historis dan adanya faktor keagamaan dan kedekatan etnis yang mendasari terbentuknya kelompok teroris di Irlandia Utara. Dikotomi wilayah antara utara dan selatan yang terjadi mendorong terbentuknya kecemburuan sosial dan perbedaan identitas di dalam Irlandia Utara itu sendiri. Ditambah dengan terbaginya dua kelompok agama, yaitu Protestan dan Katolik dimana salah satu dari agama tersebut mendapatkan pengaruh kuat dari wilayah Inggris Raya, sehingga memunculkan perbedaan dan menjadi justifikasi bagi tindakan IRA untuk menuntut *self independent* dari wilayah Inggris Raya. Selain itu, Dingley juga memaparkan keberhasilan yang diperoleh oleh kekuatan militer, polisi, dan intelijen Inggris Raya dalam mempersempit hingga mengatasi teror yang dilakukan oleh IRA melalui penempatan informan di dalam kelompok IRA tersebut. Sehingga tindakan pencegahan dan respon pemerintah lebih tepat sasaran.

Tinjauan kelima, melihat pada hasil karya Daniel Byman, penelitian ini melihat dari faktor historis diawali dari gerakan jihad Anti-Soviet yang muncul di Afghanistan, kemudian membahas kemungkinan peran dari Amerika Serikat dalam mendanai pembentukan Al-Qaeda melalui bin Laden. Pasca terbentuknya Al-Qaeda, Byman juga memberikan pemaparan mengenai tujuan dibentuknya Al-Qaeda dan alasan mengapa Al-Qaeda justru memilih Amerika Serikat sebagai pusat serangan teror. Byman juga menunjukkan korelasi antara Taliban dan Al-Qaeda pra serangan 11 September, termasuk identifikasi plot serangan dan beberapa serangan kunci yang dilancarkan oleh Al-Qaeda. Beberapa diantaranya adalah serangan ke Kedutaan Amerika Serikat di Nairobi dan Tanzania pada tahun 1998 dan arti penting dari serangan tersebut bagi Al-Qaeda. Daniel Byman juga membedah ideologi yang digunakan atau berpengaruh dalam Al-Qaeda, diantaranya Salafisme, Wahabisme, Deobandisme, dan ahl-e Hadith. Termasuk dalam pembedahan ini adalah identifikasi tokoh penting dari masing masing ideologi.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Keamanan Nasional

Keamanan Nasional secara umum dapat didefinisikan sebagai kebutuhan suatu negara untuk mampu menjaga keberadaan atau *survival of the state* melalui penggunaan aspek ekonomi, diplomasi, proyeksi kekuatan, dan kekuatan politik. Merujuk pada Braithwaite (1998:9, dalam Anyadike, 2013:13) konsep keamanan nasional juga dapat diartikan sebagai kemampuan negara untuk melindungi nilai-nilai yang dianut negaranya dari ancaman luar. Jika merujuk pada Hans Morgenthau (1945, dalam Anyadike, 2013:13), keamanan nasional memiliki keterkaitan dengan kepentingan nasional. Dimana kepentingan nasional berperan sebagai inti dari perilaku politik negara atau respon terhadap suatu fenomena. Konsep ini pada awalnya menitikberatkan pada keberadaan kekuatan militer, namun mengalami perluasan pasca Perang Dunia II. Untuk dapat mencapai kondisi aman, negara membutuhkan kepastian akan keamanan di berbagai sektor. Ancaman terhadap keamanan tidak hanya berasal dari ancaman konvensional seperti ancaman dari negara lain, namun juga terdapat ancaman non konvensional yang berasal dari aktor non negara seperti perusahaan multinasional, kejahatan lintas batas, bencana alam, dan organisasi non pemerintahan. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk memastikan keamanan nasional meliputi: 1) penggunaan hubungan diplomasi untuk mencari sekutu dan melokalisir ancaman; 2) penggunaan kekuatan ekonomi untuk meningkatkan nilai tawar dan mencapai kerjasama baru dengan pihak lain; 3) memastikan kekuatan militer yang efektif; dan 4) memastikan ketahanan dan keberadaan infrastruktur penting penopang negara.

1.5.2 Counter-Terrorism

Merujuk pada Graeme Steven dan Rohan Gunaratna (2004: 100), pendekatan *counter terrorism* membutuhkan tiga fase. Pertama yaitu fase preventif, responsif, dan pasca teror. Ketiga fase ini bertujuan untuk mampu menanggulangi dan mengatasi kerusakan, trauma, serta memastikan pemulihan dari kondisi

masyarakat atau negara. Secara bentuk tindakan, terdapat dua preferensi pendekatan yaitu Criminal Justice Model dan War Model. Model pertama, Criminal Justice Models, selanjutnya peneliti sebut dengan CJM, merupakan model yang menitikberatkan pada penggunaan prinsip prinsip demokratis sebagai dasar penanggulangan teror. Sementara model kedua, War Model, selanjutnya peneliti sebut WM, merupakan model yang lebih mengedepankan pada upaya untuk membatasi dan melakukan tindakan langsung dibandingkan mengedepankan nilai nilai demokrasi.

1.5.3 Kerjasama

Kerjasama dapat diartikan sebagai hubungan yang tidak didasarkan pada koersi dan pertikaian, serta dilegitimasi dalam organisasi internasional. Aktor negara menjalankan hubungan dalam suatu organisasi dan rezim internasional yang berdasarkan pada kesepakatan peraturan, norma, dan proses pengambilan keputusan. dalam proses pengambilan keputusan inilah negara berusaha memecahkan isu isu yang dihadapi bersama (Dougherty & Pfaaltzgraf, 1997:418). untuk konteks penelitian ini, peneliti menekankan bahwa kerjasama yang dimaksud adalah hubungan antara dua negara maupun hubungan satu negara dengan banyak negara lainnya. Merujuk pada K.J. Holsti (1998:209-211), kerjasama dapat terjadi dalam konteks yang berbeda, namun kebanyakan interaksi kerjasama terjadi secara langsung di antara dua negara yang sedang menghadapi isu bersama atau masalah tertentu yang dapat mengganggu kepentingan bersama kedua negara tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka kerjasama sederhananya dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan dua negara atau lebih untuk menjalankan hubungan dengan tujuan mencapai kepentingan bersama.

1.6. Hipotesis

Nigeria dan Chad saling membutuhkan satu sama lain untuk menangani Boko Haram karena tindakan Boko Haram membahayakan keamanan Nigeria dan aktivitas Boko Haram cenderung meluas ke negara negara tetangga. Karena itu,

ketika pendekatan militer Nigeria terkendala oleh keterbatasan otoritas maka diperlukan pendekatan non militer dalam bentuk kerjasama dengan negara negara tetangga yang terdampak.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Konsep

1.7.1.1 Keamanan Nasional

Merujuk pada Alozieuwa (2012, dalam Anyadike, 2013:14), ancaman dari Boko Haram yang dialami oleh Nigeria sejak tahun 2009 berbeda dengan kondisi ancaman yang berada di kawasan Niger Delta. Perbedaan tersebut terletak pada perbedaan kebutuhan respon atau penanganan. Kondisi di Niger Delta merupakan kondisi perlawanan dengan motif untuk memisahkan diri dari Nigeria dan didukung dengan keberadaan perusahaan minyak multinasional yang berada di kawasan Niger Delta. Sementara kondisi yang terjadi dengan Boko Haram merupakan fenomena yang dinamis. Pada awalnya, motif dari Boko Haram merupakan menciptakan ketidakstabilan dan menyebarkan ketakutan melalui setiap tindakannya. Secara pemilihan korban, Boko Haram pada awalnya hanya menyerang aparat keamanan negara dan merusak bangunan yang menurut ideologi kelompok Boko Haram tersebut adalah wujud dari budaya yang menyimpang dari Barat. Namun, pasca tahun 2009, pergerakan Boko Haram semakin luas dari segi operasi wilayah dan pemilihan korban. Aparat keamanan tidak lagi menjadi target tunggal, namun Boko Haram juga mulai menargetkan serangan mereka pada masyarakat sipil, kelompok kelompok NGO's, dan merusak pos pos perbatasan dengan negara lain.

Terdapat dua kemungkinan yang mendasari keberadaan dan perubahan dari aktivitas Boko Haram tersebut. Kemungkinan pertama, Boko Haram merupakan hasil dari kondisi internal Nigeria dengan kondisi sosial ekonomi yang bermasalah. Termasuk adanya perbedaan tajam secara kondisi perekonomian antara Nigeria bagian Utara dan Selatan. Selain faktor sosial ekonomi, terdapat faktor *grievance* yang mendasari pergerakan Boko Haram semakin kejam, yakni

pasca terbunuhnya pemimpin mereka, Mohamed Yusuf, ketika berada dalam tahanan. Sementara kemungkinan kedua, Boko Haram memiliki keterkaitan global dengan Al-Qaeda atau Al Qaeda in Islamic Maghreb dalam setiap serangannya. Dimana hal ini juga didukung oleh letak geografis Nigeria dan negara negara lain sepanjang area Sahel yang juga memiliki ancaman keamanan yang sama.

1.7.1.2 Counter-Terrorism

Merujuk pada Graeme Steven dan Rohan Gunaratna (2004: 100), pendekatan *counter terrorism* membutuhkan tiga fase. Pertama yaitu fase preventif, responsif, dan pasca teror. Ketiga fase ini bertujuan untuk mampu menanggulangi dan mengatasi kerusakan, trauma, serta memastikan pemulihan dari kondisi masyarakat atau negara. Secara bentuk tindakan, terdapat dua preferensi pendekatan yaitu Criminal Justice Model dan War Model. Model pertama, Criminal Justice Models, selanjutnya peneliti sebut dengan CJM, merupakan model yang menitikberatkan pada penggunaan prinsip prinsip demokratis sebagai dasar penanggulangan teror. Sementara model kedua, War Model, selanjutnya peneliti sebut WM, merupakan model yang lebih mengedepankan pada upaya untuk membatasi dan melakukan tindakan langsung dibandingkan mengedepankan nilai nilai demokrasi. WM ini memandang bahwa terorisme merupakan bentuk dari perang revolusioner dan dalam menindaklanjutinya membutuhkan berbagai bantuan yang bisa didapatkan. Bantuan tersebut dapat berupa kekuatan militer dari pasukan khusus, anti teror, QRF, dan penerjunan pasukan dalam jumlah besar. Dasar dari tindakan ini adalah karena menindak terorisme merupakan *waging war*, sebuah tindakan perang diperlukan untuk mampu mengatasi permasalahan ini secara efektif.

Dari segi tolok ukur, tindakan *counterterrorism* ini dapat beragam meliputi tindakan defensif, mengurangi tingkat kerawanan negara terhadap tindakan teror, dan tindakan ofensif, yang bertujuan untuk mengatasi, mencegah, dan merespon tindakan teror tersebut. Termasuk di luar itu adalah segala tindakan pendamping yang diperlukan untuk mempersiapkan dan meningkatkan kemampuan terhadap

insiden teror. Hal ini diperlukan karena teroris beroperasi dalam tingkatan yang berbeda dan menargetkan dimensi yang berbeda pula, seperti dimensi ekonomi, militer, nasional, dan internasional. Beberapa opsi tindakan yang dapat dilakukan negara diantaranya: 1) tindakan politis, bertujuan untuk menawarkan resolusi yang langsung menargetkan pada akar permasalahan. Negara dapat melakukan penilaian dan menawarkan opsi kebijakan yang mengobati rasa kekecewaan kelompok teroris tersebut, baik dalam hal sosial-ekonomi yang bertujuan untuk mengakomodasi keinginan teroris; 2) tindakan ekonomi, melalui pembentukan kondisi yang mengakibatkan kelompok teroris tidak mampu lagi mendapatkan dukungan dana dan menutup bantuan dari kelompok teroris potensial lainnya. Tindakan ini perlu untuk dilakukan secara nasional dan internasional; 3) tindakan hukum, berupa penandatanganan dan ratifikasi protokol dan konvensi internasional terkait penanganan teroris, seperti Konvensi PBB atau kerjasama regional penanggulangan teror (Steven & Gunaratna, 2004: 103-7).

1.7.1.3 *Soft Power*

Merujuk pada Joseph Nye (2005: 1-2), istilah *power* merujuk pada kemampuan untuk melakukan sesuatu. Secara umum juga dapat diartikan sebagai kapabilitas untuk mempengaruhi perilaku dari pihak lain agar sesuatu dapat terjadi sesuai keinginan. Lebih spesifiknya, Joseph Nye menggambarkan bahwa *power* merupakan kapabilitas yang dimiliki satu pihak untuk mempengaruhi pihak lain dan menghasilkan sesuatu yang diinginkan oleh pemilik *power*. Dimana wujud dari *power* ini sendiri dapat beragam seperti paksaan, godaan, atau menawarkan sesuatu yang menarik pihak lain untuk patuh dan bekerja sama. Terkait *soft power*, Joseph Nye (2005: 5) mendefinisikan secara sederhana bahwa *soft power* adalah mempengaruhi orang lain dengan cara tidak langsung. *Soft power* bergantung pada kemampuan untuk membentuk dan menyediakan opsi bagi pihak lain. *Soft power* merupakan kemampuan untuk membentuk preferensi perilaku atau tindakan yang berhubungan dengan aset aset *intangibles*. Aset aset *intangibles* ini meliputi budaya, persona, nilai dan norma politik, dan kebijakan yang dirasa mampu menunjukkan kekuatan legitimasi dan memiliki nilai moral

yang tinggi. Implementasi *soft power* lebih kepada tindakan persuasi atau kemampuan untuk menggerakkan pihak lain melalui argument atau narasi yang kuat. Berbeda dengan *hard power* yang memiliki nilai ukur *tangible* seperti uang atau kekuatan fisik, *soft power* lebih menekankan pada keatraktifan yang mampu mendorong pihak lain terhadap *values* yang sama dan secara perlahan akan ikut berkontribusi dalam mewujudkan *values* tersebut.

Merujuk pada Joseph Nye (2005: 11), sumber dari *soft power* bagi suatu negara terletak pada tiga sumber utama, meliputi: 1) budaya negara tersebut, dimana budaya tersebut dapat meningkatkan nilai atraktif dari negara; 2) nilai politik yang diterapkan secara domestik dan internasional; 3) kebijakan luar negeri sebagai wujud dari legitimasi pemerintah dan otoritas moral negara. *Soft power* sendiri juga memiliki keterbatasan karena bentuk *power* ini lebih mengandalkan pada afeksi dan kooptasi dengan pihak lain. Joseph Nye (2005: 15) menggambarkan bahwa keterbatasan dari *soft power* terletak pada kondisi yang mengiringi sehingga *outcomes* yang diharapkan setelah terjadi pengaturan preferensi dapat terwujud. *Soft power* dinilai lebih memiliki kekuatan ketika penggunaannya tidak terpusat di satu tempat dan menggunakan nilai nilai yang familiar dalam pembentukan *agenda setting* untuk pihak yang dituju.

1.7.2 Tipe Penelitian

Peneliti memutuskan untuk mengambil tipe penelitian eksplanatif yang bertujuan menerangkan dan menguji hipotesis dari variabel variabel penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menitikberatkan pada kebutuhan mendasar apa saja yang mendorong Nigeria dan Chad untuk melakukan kerjasama dalam menghadapi isu terorisme Boko Haram.

1.7.3 Metode Pengumpulan Data

Peneliti akan menggunakan analisa konten. Metode ini jika merujuk pada Margaret G. Hermann (2008), merupakan metode yang digunakan untuk melakukan analisa dan mempelajari figur publik tertentu yang sulit atau tidak memungkinkan untuk ditemui secara langsung. Hal ini juga dipermudah dengan

keberadaan internet dan kemajuan teknologi lainnya yang membantu pengumpulan data. Jika merujuk pada Weber (1990, dalam Hermann, 2008) metode ini merupakan serangkaian prosedur yang mampu mengartikan atau memberikan makna terhadap serangkaian teks. Lebih lanjut, peneliti akan menganalisis beberapa pidato dan pernyataan resmi kedua negara, jurnal ilmiah yang ditulis oleh beberapa institusi resmi, serta berita resmi yang telah beredar dari surat kabar online yang terverifikasi.

1.7.4 Metode Analisis Data

Peneliti menggunakan tinjauan analisis data secara kualitatif, khususnya terkait dengan metode discourse analysis. Discourse analysis sendiri adalah suatu analisis yang mengkaji ungkapan atau bahasa yang digunakan oleh suatu pihak secara alamiah dalam bentuk tulisan maupun lisan (Schiffrin, 2007: 1). Dalam hal ini, peneliti akan mengoleksi data dari beberapa sumber resmi seperti potongan rekaman atau keterangan dari transkrip pihak terkait serta penggunaan data sekunder. Kemudian bergantung pada interpretasi peneliti dalam menganalisis sumber sumber untuk disusun menjadi hasil penelitian.

1.7.5 Jangkauan Penelitian

Peneliti akan menitikberatkan rentang waktu penelitian pada tahun 2015 - 2018, berdasarkan pada situasi di tahun 2014 ketika serangan Boko Haram mulai meluas ke negara negara yang berbatasan dengan Nigeria, utamanya di sekitar kawasan Danau Chad. Peneliti menilai rentang waktu tersebut menjadi titik rawan jika melihat pada justifikasi dan pemilihan target yang dilakukan oleh Boko Haram terhadap Nigeria dan negara negara tetangga di kawasan Danau Chad. Kemudian di tahun 2015, peneliti dapat memilah respon dan kebijakan yang pemerintah Nigeria dan Chad lakukan terhadap ancaman Boko Haram.

1.7.6 Sistematika Penelitian

Bab I merupakan bagian awal dari penelitian yang menitikberatkan pada pemahaman kondisi dan narasi yang digunakan pemerintah Nigeria dalam menghadapi ancaman Boko Haram. Peneliti juga menyertakan sasaran rekrutmen

dan rangkaian kejadian teror yang telah dilakukan oleh Boko Haram. Kemudian, peneliti juga menunjukkan wilayah operasi serangan Boko Haram di luar kawasan Nigeria, termasuk inisiasi kerjasama yang dilakukan oleh negara negara di kawasan Danau Chad yang tergabung dalam MNJTF. Bagian bab II, peneliti menjelaskan bentuk kerjasama apa saja yang telah ada dan pendekatan yang diambil, khususnya pada dua bentuk kerjasama yakni ECOWAS dan MNJTF. Selain itu, peneliti juga menyajikan data terkait respon internal atau respon dalam negeri tiap negara anggota MNJTF dalam menangani aksi teror Boko Haram. Pada bab III peneliti akan menunjukkan poin poin kerjasama yang telah dilakukan ataupun dicanangkan oleh Nigeria dan Chad, utamanya melihat orientasi kebijakan tersebut dan melihat peran individu berpengaruh, pembuat kebijakan, serta keterlibatan masyarakat sipil. Bab IV menjadi penutup berisikan kesimpulan dari rangkaian analisis dari bab sebelumnya.